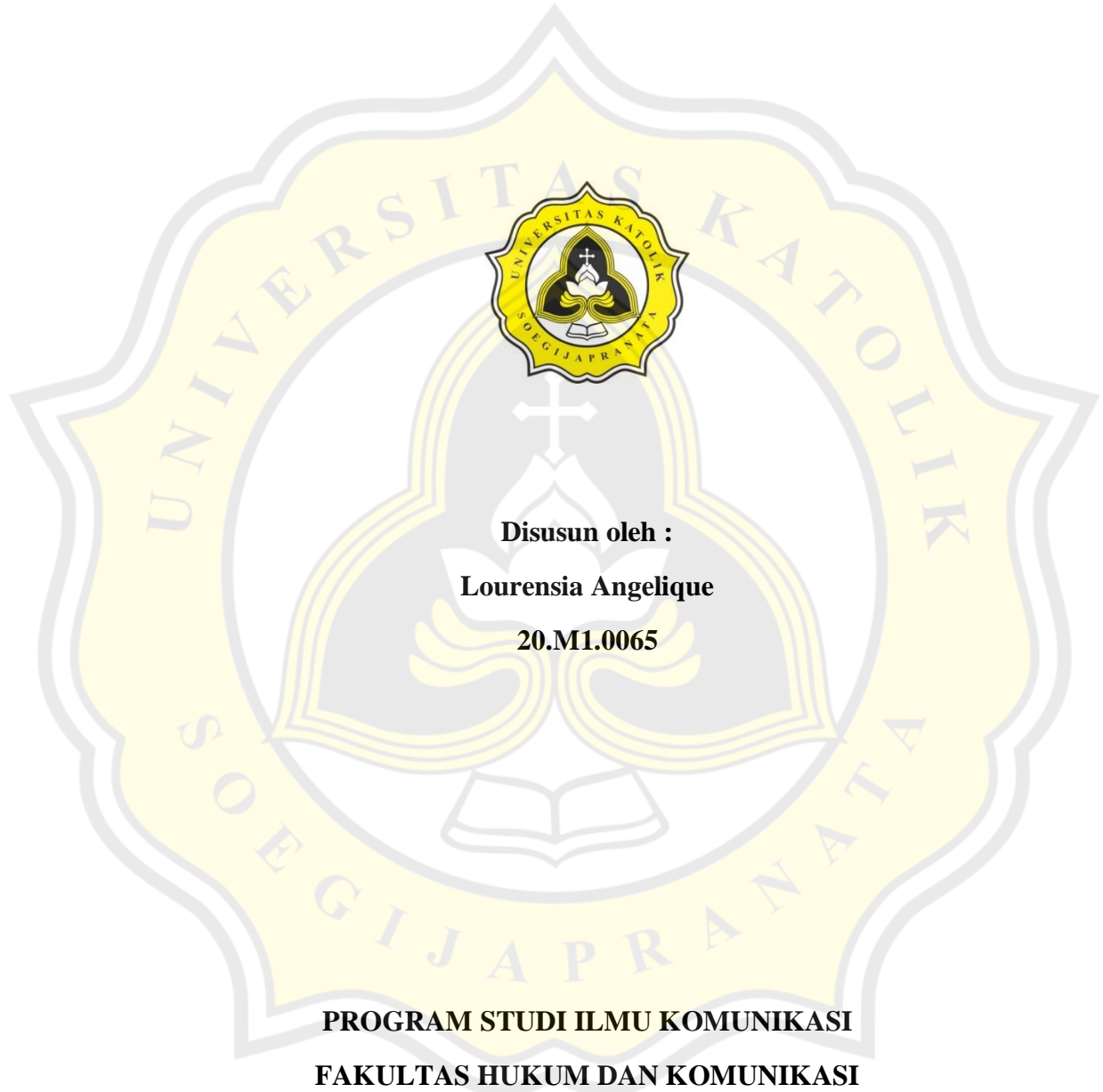


SKRIPSI

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU PROVINSI MALUKU
PADA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU 2024**



Disusun oleh :

Lourensia Angelique

20.M1.0065

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU PROVINSI MALUKU
PADA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh :

Lourensia Angelique

20.M1.0065

Dosen Pembimbing :

Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.

B. Lenny Setyowati, S.S., M.I.Kom.

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2024

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU PROVINSI MALUKU
PADA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU 2024**

Lourensia Angelique

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

ABSTRAK

Layanan informasi yang kurang maksimal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilihan umum (Pemilu). Bentuk layanan informasi publik tersebut dapat berupa penyediaan informasi secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaannya, PPID KPU Provinsi Maluku belum secara maksimal menjalankan tugas dalam menyediakan informasi publik mengenai penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan akan hak kebutuhan informasi public bagi masyarakat menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dengan Ketua KPU dan PPID KPU, observasi tidak langsung pada media daring, pendokumentasian layanan informasi publik yang dimiliki. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa penyampaian layanan informasi publik terkait tahapan pemilu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memenuhi kebutuhan informasi mengenai kebijakan publik, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, serta memenuhi tugas PPID sebagai pelayan informasi publik. Melalui hasil tersebut terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Maluku pada tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 masih belum dijalankan secara maksimal karena masih terkendala oleh ketersediaan data yang kurang, jumlah staf yang sedikit dan adanya tumpang tindih tugas PPID dalam memberitakan informasi publik.

Kata kunci : Tahapan Pemilu, layanan informasi publik, PPID, KPU

PUBLIC INFORMATION SERVICE PPID KPU MALUKU PROVINCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE 2024 ELECTION STAGE

Lourensia Angelique

Soegijapranata Catholic University

Semarang

ABSTRACT

Information services that are less than optimal from the General Elections Commission (KPU) will affect public participation in the success of general elections (Pemilu). The form of public information services can be in the form of providing information directly and indirectly carried out by the Information and Documentation Management Officer (PPID). In its implementation, the PPID KPU of Maluku Province has not optimally carried out its duties in providing public information regarding the implementation of the 2024 election stages. This has an impact on fulfilling the right to public information needs for the community to be less than optimal. Therefore, researchers conducted research using descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews with the Chairman of the KPU and PPID KPU, indirect observations on online media, documenting their public information services. The results of this study explain that the delivery of public information services related to the election stage aims to increase public participation, meet information needs regarding public policies, improve the smooth flow of information and public accessibility, and fulfill PPID's duties as a public information servant. Through these results, there is a conclusion stating that the PPID KPU public information service of the Maluku Province KPU at the stage of holding the 2024 election is still not being carried out optimally because it is still constrained by insufficient data availability, a small number of staff and overlapping PPID tasks in reporting public information.

Keywords : Election Stages, public information services, PPID, KPU